

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN TARGET				PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Meningkatnya Konektivitas Transportasi	1. Rasio Konektivitas Transportasi	0,690 Rasio	25%	25%	25%	25%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan	14,23					
							1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase Meningkatnya Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	40%					
							Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	Persiapan	√			
			Proses Lelang		√									
			Pelaksanaan Kegiatan			√								
			Serah Terima Hasil Pekerjaan			√				√				
							2. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Meningkatnya Lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	70%					
			25%	25%	25%	25%	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	Persiapan	√			
										Lelang		√		
Masa Pelaksanaan Pekerjaan										√				
Serah Terima Hasil Pekerjaan			√	√										
Meningkatnya Simpul Transportasi	2. Jumlah pelabuhan laut pengumpan regional	1 Pelabuhan					Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah Trip Perjalanan Kapal	3,856 Trip					
							1. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP), Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan yang memiliki RIP dan DLKR/DLKP	1 Pelabuhan					
			25%	25%	25%	25%	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen	Persiapan	√			
										Lelang		√		
										Masa Pelaksanaan Pekerjaan			√	
Serah Terima Hasil Pekerjaan			√	√										

							2. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Pelabuhan						
			25%	25%	25%	25%	-Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Peizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Peizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen	Persiapan	√				
										Lelang		√			
										Masa Pelaksanaan Pekerjaan			√		
										Serah Terima Hasil Pekerjaan			√	√	
			25%	25%	25%	25%	-Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Pelabuhan	Pelaksanaan Pemilihan Penyedia	√	√	√		
										Pengadaan dan Pelaksanaan Kegiatan		√	√	√	
										Pemeliharaan dan Pelayanan	√	√	√	√	
										Proses Rencana Induk Pelabuhan (RIP)		√	√	√	
							3. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Unit						
			25%	25%	25%	25%	-Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani trayek lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani trayek lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Dokumen	Persiapan	√				
										Lelang	√	√			
										Masa Pelaksanaan Pekerjaan		√	√		
										Serah Terima Hasil Pekerjaan			√		
			25%	25%	25%	25%	- Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang melayani trayek antar Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang melayani trayek antar Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	Persiapan	√				
										Proses Lelang		√			
										Pelaksanaan Pekerjaan		√	√		
										Serah Terima Hasil Pekerjaan				√	
	3. Jumlah terminal type B	7 Terminal					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan	14,23						
							1. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang dikelola	7 Terminal						
			25%	25%	25%	25%	-Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan	4 Terminal	Persiapan dan Lelang	√				
										Pelaksanaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan		√	√	√	

			25%	25%	25%	25%	-Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Rehabilitasi	4 Terminal	Persiapan	√									
										Proses Lelang		√								
										Pelaksanaan Pekerjaan dan Serah terima hasil Pekerjaan		√	√	√						
Keseimbangan Kebutuhan Angkutan	4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	69,10%					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase meningkatnya pelayanan urusan pemerintah daerah provinsi	90%	Persiapan dan Pemilihan Penyedia	√									
										Pelaksanaan dan Memonitoring		√	√							
										Evaluasi				√						
	5. On Time Performance Layanan Transportasi	57,80%	25%	25%	25%	25%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan	14,23 Rasio											
							1. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	80%											
							- Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah ASN yang memiliki kompetensi Auditor dan Inspektur LLAJ	8 Orang	Persiapan	√									
										Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan		√	√	√						
							25%	25%	25%	25%	-Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	Persiapan	√					
														Pelaksanaan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan	√	√	√	√		
														Pelaporan Hasil Kegiatan		√		√		
							25%	25%	25%	25%	-Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	1 Laporan	Persiapan	√	√				
														Pelaksanaan Tingkat Provinsi				√		
														Pelaksanaan Tingkat Nasional				√	√	
							6. Load faktor penumpang kereta api	80%					Program Pengelolaan Perkeretaapian	Jumlah Penumpang Keretaapi	1.517.236 Orang					
													1. Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Panjang Jaringan Jalur Keretaapi yang menjadi kewenangan provinsi	24 km					
									100%					- Sosialisasi dan Uji coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Persiapan dan Koordinasi Kegiatan	√		
Kampanye/Sosialisasi Keselamatan di Perlintasan Sebidang dan Pelatihan PJL	√																			
											√									

7. Load faktor penumpang kapal laut	9%					2. Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Panjang Jaringan Jalur Keretaapi yang menjadi kewenangan provinsi	24 km						
		100%				- Sosialisasi dan Uji coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Persiapan dan Koordinasi Kegiatan		√			
									Kampanye/Sosialisasi Pengguna Transportasi Massal		√			
									Penyusunan Laporan			√		
							Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah Trip Perjalanan Kapal	3,856 Trip					
							1. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antarDaerah Kabupaten / Kota dalam daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk kapal yang melayani trayek kewenangan provinsi dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang memenuhi syarat perizinan	1 Unit					
		25%	25%	25%	25%	- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek kewenangan provinsi dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang tersedia	1 Dokumen	Persiapan	√				
									Lelang		√			
									Masa Pelaksanaan Pekerjaan			√		
						Serah Terima Hasil Pekerjaan			√	√				
						2. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Pelabuhan						
	25%	25%	25%	25%	- Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dipelihara	1 Pelabuhan	Peningkatan Pelayanan BLUD dari Segi Waktu	√	√	√	√		
								Pemeliharaan dan Pelayanan	√	√	√	√		
								Proses Pengelolaan BLUD	√	√	√	√		
8. Load faktor penumpang Bus AKDP	70%					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan	14,23						
						1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum	6 Unit						
						-Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar kota dalam 1 (satu) Provinsi	1 Laporan	Persiapan	√				
					Pelaksanaan Kegiatan				√					
					Laporan Kegiatan					√				
		25%	25%	25%	25%	- Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orangdan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Unit	Persiapan	√				
									Pelaksanaan Kegiatan	√	√	√	√	

9. Load faktor angkutan barang darat	69%							Laporan Kegiatan					√
					2. Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Palayanan Angkutan Perkotaan yang melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Meningkatnya Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	40%						
		25%	25%	25%	25%	Sosialisasi Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Persiapan	√			
									Pelaksanaan Kegiatan		√		
									Laporan Kegiatan			√	
					3. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Btas 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Meningkatnya Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40%						
		25%	25%	25%	25%	- Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Tryaek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Persiapan	√			
									Proses Lelang		√		
									Pelaksanaan Pekerjaan		√	√	
									Serah Terima Hasil Pekerjaan				√
					4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Meningkatnya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	52%						
		25%		25%	25%	- Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Peningkatan aplikasi ke versi yang lebih baru terkait penambahan fitur, peningkatan kinerja, atau penyesuaian dengan sistem operasi terbaru dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Persiapan	√			
									Proses Lelang		√		
									Pelaksanaan Pekerjaan		√	√	
									Serah Terima Hasil Pekerjaan				√
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan	14,23						
					1. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase terlaksananya pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	80%						
		25%	25%	25%	25%	- Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	Menyiapkan SK, SPT, Daftar Hadir	√	√	√	√
									Melaksanakan Kegiatan	√	√	√	√

10. Load faktor angkutan barang laut	55%								Membuat Hasil Laporan Kegiatan dan Dokumentasi	✓	✓	✓	✓	
						Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah Trip Perjalanan Kapal	3,856 Trip						
						1. Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Persentase Meningkatnya Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	70%						
		25%	25%	25%	25%	- Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang jasa pengurusan transportasi angkutan perairan pelabuhan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut tali mandiri dan depo peti kemas dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Persiapan Pekerjaan (Menyiapkan SK,SPT dan Matrik Kegiatan	✓				
									Pelaksanaan Pekerjaan	✓	✓			
									Laporan Pekerjaan				✓	✓
						2. Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Meningkatnya Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	35%						
		25%	25%	25%	25%	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Persiapan	✓				
									Proses Lelang		✓			
									Pelaksanaan Pekerjaan		✓	✓		
									Serah Terima Hasil Pekerjaan					✓
11. Load faktor angkutan barang kereta api	54%					Program Perkeretaapian	Jumlah Penumpang Keretaapi	1.517.236 Orang						
						1. Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Izin Keretaapi khusus	1 Dokumen						
					100%	-Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Sinkronisasi Data		✓			
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi			✓		
									Penyusunan Laporan			✓		
						Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan	14,23						
						1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	2 Unit						

Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas	12. V/C Ratio Jalan Provinsi	0,392 Rasio							Penyiapan Dokumen KAK, HPS, Gambar Teknis dan Spesifikasi Teknis		√		
									Menyerahkan dokumen - dokumen untuk proses pelelangan		√		
			50%	25%	25%	- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		2 Unit	Proses Pelelangan			√	
									Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan			√	
									Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan				√
									Proses Pembayaran				√
						2. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Titik Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	4 Titik					
			25%	25%	25%	-Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	1. Menyiapkan dokumen, SK Panitia, Surat Undangan, dan Bahan Rapat	√	√	√	√
									2. Pelaksanaan Kegiatan Forum Lalu Lintas				
									3. Pembuatan Notulen Hasil Rapat				
						3. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persentase Meningkatnya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	33%					
			25%	25%	50%	-Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Pengawasan Andalalin	1 Laporan	1. Melakukan Inventarisasi terhadap Dokumen Andalalin yang sudah dikeluarkan		√	√	√
									2. Melakukan Inventarisasi terhadap bangunan / gedung / pusat kegiatan yang sudah atau belum memiliki andalalin				

PALEMBANG, 11 JANUARI 2025

14
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN
SUMATERA SELATAN
Drs. H. ARINARSA JS
Pusat Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710603 199101 1 002